

SENI DAN BUDAYA

**Kebebasan Dan Kebudayaan, (Batas-Batas)Toleransi, Akomodasi,
Dan Asimilasi**

Oleh:
I Wayan Kondra

SENI RUPA MURNI
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI INDONESIA
DENPASAR
2018

Abstrak

Secara konseptual kebebasan dan kebudayaan, (batas-batas) toleransi, akomodasi dan asimilasi menghendaki manusia hidup secara tidak terbatas. Caren Bagus (dalam Ali Usman, 2006 : 5), menyatakan bahwa kebebasan dapat dipahami sebagai keadaan yang tidak dapat dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar. Kebebasan dan kebudayaan muncul ketika era reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998, di mana manusia Indonesia merasakan kebebasan berpikir, berpendapat, berpolitik, kebebasan berbudaya dan berdemokrasi.

Konsep kebebasan dan kebudayaan seharusnya kita menganut budaya multikulturalisme menurut Chris Barker (2008 : 379) menyatakan bahwa, setiap suku bangsa diyakini status setara, memiliki hak untuk menjaga warisan budaya mereka dengan tujuan untuk merayakan perbedaan mereka. Dibatasi dalam kesadaran toleransi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, sehingga budaya diakomodasi, sehingga terjadi asimilasi, yang pada akhirnya kesadaran multikultur, dalam berbangsa.

Keyword: Kebebasan Kebudayaan, toleransi, akomodasi dan asimilasi.

Pendahuluan

Kebebasan dan kebudayaan mempunyai banyak arti tergantung dari sudut mana kita memandang, untuk mengertikan kebebasan dan kebudayaan tersebut, dalam tulisan ini kebebasan dan kebudayaan dibatasi toleransi, akomodasi dan asimilasi.

Kebebasan dan kebudayaan merupakan hal yang mendasar atau hak hasasi dari manusia terlahir di dunia ini yang dimiliki oleh setiap individu, dan kebebasan sangat erat hubungannya dan tergantung dengan kebudayaan. Deskripsi jenis kebudayaan yang relevan hubungannya dengan kebebasan individu. Yaitu 1). Kebudayaan kemasyarakatan, yang praktek-praktek serta lembaga –lembaganya mencakup sejumlahkegiatan manusia, meliputi kehidupan public dan pribadi. 2). Kebudayaan kemasyarakatan berkaitan dengan kelompok-kelompok bangsa. 3). Kebebasan merupakan hal utama dalam tradisi liberal. Kebebasan tergantung bagaimana kebudayaan kemasyarakatannya. 4). Hak-hak sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan kebudayaan kemasyarakatannya, 5). Para liberal menanggapi kebudayaan yang tidak liberal.

Ronald Dworkin mengatakan bahwa anggota suatu kebudayaan memiliki kosa kata tradisi dan konvensi bersama (Dworkin 1985: 231). Namun hal itu memberikan gambaran yang abstrak atau sumir mengenai kebudayaan. Dalam hal kebudayaan kemasyarakatan, kosakata bersama ini adalah kosakata kehidupan social sehari-hari, yang diwujudkan dalam praktek-praktek meliputi sebagian besar kegiatan manusia.

Suatu kebudayaan bertahan dan berkembang di dalam dunia modern, akibat tekanan terhadap pembentukan suatu kebudayaan bersama atau tunggal di setiap Negara, maka harus ada kebudayaan kemasyarakatan. Hubungan kajian semacam ini ditegaskan oleh sebagian besar analis nasionalisme. Kaum ini menyimpulkan bahwa hal yang menentukan bangsa adalah kebudayaan yang meresap, merangkul, atau kebudayaan organisasi (misalnya A Smith 1986: 2; Margalit dan Raz 1990: 444; Tamir 1998; Poole 1993).

Bebas mempunyai arti yaitu terlepas sama sekali tidak terhalang, terganggu atau bisa juga merupakan suatu kemerdekaan (*freedom*) bagi setiap individu-individu manusia. Menurut John Loche (dalam Tiber M. Machan, 2008 : 12), menyatakan kebebasan berarti hak setiap manusia untuk bertindak tanpa dihalangi orang lain. Kaitannya dengan pendapat tersebut menurut Caren Bagus (Ali Usman,2006 : 5), menyatakan bahwa kebebasan dapat dipahami sebagai keadaan

yang tidak dapat dipaksa atau ditentukan oleh sesuatu dari luar, sejauh kebebasan disatukan dengan kemampuan internal.

Kebebasan dan kebudayaan muncul di Indonesia sebelum reformasi, yang tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda kebudayaan tetapi satu Indonesia. Konsep tersebut dapat dipahami, disatu pihak kebebasan dan kebudayaan secara individu bebas dari segala rintangan. Di pihak lain kebebasan dan kebudayaan diserahkan pada masing-masing masyarakat, tetapi masih terdapat ikatan keseragaman. Inilah konsep kebebasan yang ada di Indonesia, seluruh budaya di nusantara diakui tetapi masih menganut keseragaman menjadi budaya sentries. Padahal bila kita mengacu pada konsep kebebasan dan kebudayaan seyogyanya kita menganut budaya multikulturalisme yang menurut Chris Barker (2008 : 379) bahwa, setiap suku bangsa diyakini status setara, memiliki hak untuk menjaga warisan budaya mereka dengan tujuan untuk merayakan perbedaan.

Dalam proses perjalanan kebudayaan, ternyata banyak aspek keseragaman serta kebebasan yang dikehendaki oleh kelompok social. Keseragaman budaya tidak lagi diikat menjadi satu, tetapi diserahkan kembali ke masing-masing individu, gerakan kelompok kebebasan kebudayaan mencapai puncaknya dengan nama gerakan era reformasi.

Di Indonesia gerakan kebebasan semakin menggelora di public ketika kran demokrasi dibuka secara luas. Gerakan kebebasan ini dimulai sejak tahun 1998 yang disebut era reformasi yang diusung oleh seluruh komponen masyarakat. Kenginginan masyarakat adalah perubahan tatanan kehidupan di berbagai bidang, dengan tanpa terkekang lagi dengan kebebasan berpikir, berpendapat, berpolitik, kebebasan berbudaya dan berdemokrasi.

Idealnya kebebasan dan kebudayaan secara konseptual menghendaki adanya setiap individu manusia memiliki kebebasan secara hakiki, tetapi disatu sisi kebebasan tersebut juga dibatasi oleh budaya toleransi. Menurut Hegel (dalam Tibar M, 2008 : 12) bahwa kebebasan mempunyai pandangan yang mendasar yaitu batas-batas toleransi yang yaitu kepatuhan bersama, selanjutnya setiap manusia menginginkan suatu kebebasan untuk menuju suatu perubahan. Merupakan hak individu untuk bebas dalam bertindak tanpa ada halangan dari orang lain , namun dalam batas toleransi.

Konsep kebebasan berbudaya dari pemerintah, dibingkai Bhineka Tunggal Ika karya Mpu Tantular yang berarti, berbeda-beda tetapi satu. Realitas yang berkembang secara nasional

adalah dimana budaya adi luhung yang berkembang di masing-masing provinsi didominasi oleh budaya Jawa (Jawa Centris).

Kebebasan dan kebudayaan tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selalu dilaluidengan berbagai macam masalah, sebab dalam tataran praktis kebebasan terkadang tidaklah semulus apa yang dikonseptualisasikan. Sebagai contoh pemerintah Indonesia pada masa reformasi telah sepakat terhadap kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers, ternyata pada akhirnya karena desakan kelompok Islam garis keras dikeluarkan undang-undang pornografi, yang di sebagian provinsi masih dipermasalahkan. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya toleransi budaya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap kebebasan budaya yang dimiliki setiap individu yang berbeda.

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif. (<http://www.encyclopedia>)

Toleransi merupakan warisan budaya yang terdapat dalam kutipan kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Jawa Kuna berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,

*Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Dari berbagai persoalan kebebasan dan kebudayaan, perlu diluruskan dengan batas-batas toleransi. Pemahaman konsep arti kebudayaan dalam batas toleransi, asimilasi menurut Koentjoroningrat dalam Hasibuan, SR (2002 : 119), bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta “budhaya” yang berarti budi atau akal, yang artinya kebudayaan hasil ciptaan dari manusia. Selanjutnya menurut Hall dalam (Chris Barker, 2000 : 8) kebudayaan adalah lingkungan actual untuk berbagai praktek, representasi, bahasa dan adat istiadat masyarakat tertentu. Lebih lanjut bahwa kebudayaan adalah berbagai bentuk nalar umum kontradiktif yang berakar dan membentuk kehidupan orang banyak.

Secara factual kebebasan dan kebudayaan sebenarnya membutuhkan toleransi, sebab diperlukan pengayaan kesadaran yang lebih terbuka bahwa keberagaman tidak harus dijawab dengan penyeragaman namun perbedaan adalah *sunnatullah* yang semakin memberikan warna tersendiri bagi kehidupan berbangsa (Moh Yamin: 2011: 5).

Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*tolerantia*” berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dengan kata lain, toleransi merupakan satu sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda. Menurut Michael Walzer, (Walzer: 1997: 11) setidaknya terdapat lima hal yang dimungkinkan menjadi substansi atau hakekat toleransi, Pertama, menerima perbedaan untuk hidup damai, Kedua, menjadikan keseragaman menuju perbedaan. Secara tegas, membiarkan segala kelompok berbeda dan hadir dalam dunia. Toleransi tidak menghendaki adanya proses penyeragaman dari keberagaman, sebab ini sangat rentan komplik. Ketiga, toleransi membangun moral stoisme, yakni menerima bahwa orang lain memiliki hak walaupun secara praktis haknya kurang menarik simpati orang lain. Akan tetapi hal tersebut tetap harus dihargai dengan sedemikian tinggi sebab ini menjadi bagian hidup bertoleransi antar sesama. Keempat, mengungkapkan transparansi pada orang lain, ingin tahu,

menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari orang lain, bukan selalu mengajari orang lain secara membabi buta tanpa memberikan ruang kepada orang lain untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas sekaligus merdeka.

UNESCO sebagai organisasi resmi PBB dalam bidang pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan deklarasi toleransi sebagai salah satu upaya mewujudkan kehidupan global yang toleran. Menurut UNESCO, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai di tengah keragaman berbudaya, kebebasan berpendapat dan karakter manusia (Moh. Yamin: 2011: 6). Ketika toleransi telah disepakati, maka yang terjadi adalah akomodasi budaya dari masing-masing kelompok, dimana kelompok yang satu akan memberikan ruang terhadap kelompok yang lain. Akomodasi budaya seperti yang terjadi di beberapa tempat di Bali, misalnya kelompok Islam Pegayaman di Buleleng, mengakomodasi budaya agama Hindu seperti melakukan *Ngejot* (membawa sesuatu makanan kepada tetangga yang beragama Hindu) saat hari raya Idul Fitri.

Selanjutnya akan terjadi asimilasi yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antarindividu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antarkelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contoh asimilasi yang terjadi di Bali yaitu penyesuaian kemauan untuk melaksanakan persembahyangan pada waktu hari raya Nyepi dengan tidak mempergunakan pengeras suara yang menjolok oleh umat Muslim, menghormati larangan hidupkan lampu, dan berpergian.

Penutup

Masalah kebebasan dan kebudayaan, (batas-batas) toleransi, akomodasi dan asimilasi kita tingkatkan secara terus-menerus dan bersama-sama, yang selama ini telah berjalan dengan baik kemudian dikembangkan dengan memetik suatu manfaat bagi semua komponen bangsa dalam berbangsa dan bernegara dalam kesatuan NKRI. Hal yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Kampanye secara terus menerus, dan dialog antar tokoh agama guna mencapai kesadaran multikulturalisme.
2. Kesadaran akan empat pilar kebangsaan: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI.
3. Kejujuran pada kehidupan akan HAM, di antara umat beragama.

Daftar Pustaka

- Agger Ben, 2007, *Teori Sosial Kritis Penerapan dan Implikasinya*, Penerbit: Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Ali Usman, 2006, *Kebebasan Dalam Perbincangan Filsafat Pendidikan dan Agama*, Penerbit: Pilar Media, Yogyakarta
- Crish Baker, 2000, *Cultural Studies*, Penerbit: Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Hefner Robert W, 2007, *Politik Multikulturalisme*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, 2002, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit: Djambal, Jakarta
- Kymlicka Will, 2002, *Kewargaan Multikultur*, Penerbit: LP3ES, Jakarta
- Taena La, 2008, *Kebebasan dan Kebudayaan dalam Batas-Batas Toleransi*, SELAMI IPS Edisi 25 Volume I Tahun XIII
- Yamin Moh, 2011, *Meretas Pendidikan Toleransi*, Penerbit: Madani Media, Malang
- Wolf Martin, 2007, *Globalisasi: Jalan Menuju Kesejahteraan*, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Nomor HP : 08123671640